

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan terkait hegenoni politik Pilkada calon tunggal tahun 2020 di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai penyebab terjadinya fenomena tersebut. Persamaan yang menjadi faktor penyebab dari fenomena tersebut yaitu, pengaruh pada faktor kekuatan figur politik yang dimiliki oleh calon kepala daerah, menjadi salah satu pengaruh besar dari elektabilitas maupun popularitas yang dimiliki. Hal ini juga menyebabkan tidak adanya lawan politik karena pengaruh dari figur kandidat kepala daerah tersebut. Kemudian persamaan terakhir, dipengaruhi oleh faktor biaya politik, pengaruh tersebut karena diperlukannya anggaran untuk biaya politik yang cukup mahal dan besar dari lawan politik yang hendak maju dalam kontestasi Pilkada untuk melawan pasangan calon tunggal sehingga persoalan tersebut menjadi suatu penyebab terjadi Pilkada calon tunggal di kedua daerah tersebut.

Mengenai perbedaan yang terjadi pada Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali terletak pada faktor regulasi ambang batas, kemudian juga pada pengaruh karakter pilihan politik oleh masyarakat dan langkah komunikasi politik yang dilakukan. Ketiga pengaruh tersebut juga yang menjadikan suatu indikator terkait hegemoni politik yang terjadi. Pilkada calon tunggal Kota Semarang terjadi dipengaruhi kuat juga dengan langkah komunikasi politik yang dimanfaatkan oleh petahana untuk merangkul seluruh partai politik, yang memiliki suara di parlemen. Hal tersebut tidak terjadi pada fenomena di Boyolali, dengan

adanya regulasi ambang batas terkait pencalonan kepala daerah sangat berpengaruh bagi partai politik yang hendak maju dikarenakan terdapatnya dominasi politik pada parlemen, dikarenakan pada pilihan politik masyarakat Kabupaten Boyolali yang bersifat sosiologis.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah disampaikan pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan hegemoni politik terjadi pada Pilkada Kabupaten Boyolali, dengan keterkaitannya pada kekuatan politik yang dibangun oleh penguasa melalui memanfaatkan karakteristik pilihan politik masyarakat. Sikap politik masyarakat Kabupaten Boyolali yang cenderung bersifat pragmatis, dengan mendukung penuh dari Partai PDI Perjuangan, menyebabkan dominasi yang terjadi pada parlemen, sehingga menyebabkan keterbatasan ruang bagi partai politik lainnya untuk mengikuti kontestasi Pilkada dikarenakan syarat ambang batas yang diatur. Hal tersebut tidak terjadi pada Pilkada calon tunggal Kota Semarang yang lebih dipengaruhi pada faktor kinerja petahana yang cukup baik sehingga menyebabkan partai politik lainnya tidak mengajukan lawan politik dengan beberapa pertimbangan lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengajukan saran terkait peningkatan kualitas pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terkait pilihan politik yang diambil, sesuai dari calon pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengatasi problematika tersebut. Selain itu, peneliti juga mengajukan saran terkait penguatan kembali dari sistem

kualitas kaderisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik guna berujuan mampu menyeimbangkan dari dinamika politik yang terdapat di Kabupaten Boyolali, agar tidak menciptakan hegemoni kekuasaan oleh salah satu partai politik tertentu.